

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Sampah, sampah memiliki arti sebagai bahan yang tersisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan juga hasil alamiah berbentuk padat. Indonesia menjadi negara kedua penyumbang sampah terbesar dari 129 negara di dunia. Jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Jika dikonversikan produksi sampah setiap orang sekitar 0,7 kg per hari (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK, 2019). Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan (Sucipto, 2012).

Menurut Sejati (2009) sampah dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Sampah organik atau basah, sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah. Sampah jenis ini dapat membusuk atau hancur secara alami.
2. Sampah anorganik atau kering, sampah yang tidak dapat membusuk secara alami. Contohnya : logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol kaca dan lainnya.
3. Sampah berbahaya, sampah yang berbahaya bagi manusia dan memerlukan penanganan khusus. Contohnya : baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir.

Tabel 1.1

Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Indonesia

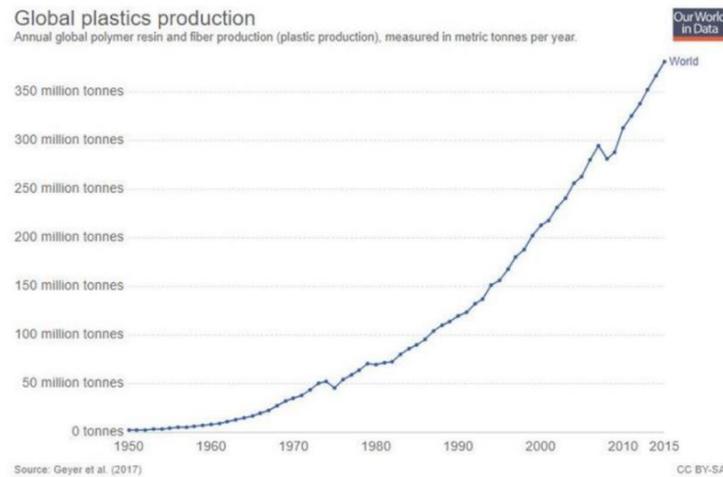
Jenis Sampah	Jumlah Sampah (%)
Sisa Makanan	40.07 %
Kayu Ranting	12.44 %
Kertas-Karton	11.21 %
Plastik	18.7 %
Logam	3.03 %
Kain	2.66 %
Karet-Kulit	2.18 %
Kaca	2.5 %
Lainnya	7.21 %

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Berdasarkan data dari KLHK tahun 2023, plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua setelah sampah sisa makanan, dengan presentase 18.7%. Plastik sendiri menjadi unggulan karena memiliki sifat yang istimewa yaitu, mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, memiliki berat yang ringan sehingga bisa menghemat biaya, tahan lama, aman dari kontaminasi kimia dan air, plastik sendiri aman sebagai kemasan barang maupun makanan, dan tahan terhadap cuaca dan suhu yang berubah, dan memiliki harga yang murah (Verina, 2021).

Keberadaan sampah plastik menjadi permasalahan pelik yang dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup

tinggi membuat angka penggunaan plastik terus meningkat setiap tahun nya (Hakim, 2019). Berdasarkan data dari *ScienceMag*



Jumlah produksi sampah plastik global dari tahun 1950 hingga 2015 selalu menunjukkan adanya peningkatan pesat setiap tahun, rata-rata peningkatannya sebesar 5,8 ton per tahun. Pada tahun 1950, produksi sampah plastik hanya sebesar 2 juta ton per tahun, angka ini meningkat 190 kali lipat pada tahun 2015 menjadi sebesar 381 juta ton per tahun dan diprediksi terus meningkat pada tahun-tahun mendatang (Hakim, 2019). Kemudian, diperkirakan sebesar 500 milyar hingga 1 triliun kantong plastik digunakan secara global (Muslihun, Anggoro dan Kismartini, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi tinggi, mencapai 270 juta jiwa, berikut data yang didapatkan dari BPS

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

Indonesia	2021	2022	2023
	272 682,5	275 773,8	278 696,2

Sumber : <https://www.bps.go.id>, 2023

Tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membuat angka penggunaan sampah terus meningkat pula setiap tahun nya (Hakim, 2019). Ini memicu produksi sampah seperti kantong plastik yang digunakan saat belanja, digunakan sebagai pembungkus makanan, menjadi wadah penyimpanan dan lain-lain. Belum lagi, kemasan produk yang dijual kebanyakan juga terbuat dari bahan baku plastik (Selke & Culture, 2016). Penggunaan plastik yang tinggi di masyarakat ini disebabkan karena plastik memiliki sifat yang fungsional dan memiliki biaya rendah dalam proses produksinya, sehingga dapat diproduksi secara massal dan sangat mudah untuk ditemukan (Wahyudin dan Afriansyah, 2020).

Di beberapa negara termasuk Indonesia, produksi sampah plastik menjadi persoalan besar yang segera membutuhkan penanganan. Pemerintah, politisi, serta masyarakat merasakan keprihatinan produksi sampah (Permana, Rizal & Hasan, 2020). Sampah plastik memiliki dampak besar terhadap kerusakan lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai. Proses pembusukan sampah plastik dengan tanah membutuhkan waktu 100-500 tahun hingga akhirnya dapat terdekomposisi sempurna (Karuniastuti, 2012). Hal ini menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan Kesehatan. Sementara Sampah plastik yang dibuang ke laut tentunya akan berbahaya bagi hewan laut, karena plastik-plastik tersebut akan

termakan oleh hewan, hal ini dapat menyebabkan kematian beberapa spesies laut (Muslihun, Anggoro, Kismartini, 2020).

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dwi Amanda (2023) mengatakan, rasio jumlah plastik terhadap ikan pada 2025 adalah 1:3. Pada 2050 diperkirakan jumlah sampah akan lebih banyak dibandingkan ikan di laut, diperparah juga dengan tindakan overfishing. Keberadaan sampah plastik di laut dapat membunuh biota, merusak ekosistem dan membahayakan kegiatan navigasi perkapalan apabila sampah-sampah tersebut tersangkut pada baling-baling kapal.

Sampah plastik menyumbang 12% sebagai komponen penyebab pencemaran lingkungan dan jumlah ini diprediksi akan mencapai angka 70% pada tahun 2050 (Hakim, 2019). Apabila plastik dibakar maka akan mengeluarkan emisi *dioksin (Polychlorinated Dibenzo-p-dioxis)* yang merupakan zat beracun dan berbahaya bagi Kesehatan. Zat tersebut dapat menyebabkan adanya peningkatan risiko lesi kulit yang parah seperti chloracne dan hiperpigmentasi, perubahan fungsi hati dan metabolisme lipid, kelemahan umum yang terkait dengan penurunan berat badan yang cukup drastis, perubahan aktivitas berbagai enzim hati, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan sistem endokrin dan saraf (Pertiwi dkk, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Rochman dkk (2015) sebesar 28% dari ikan dan 55% spesies laut lain yang dijual untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia mengandung plastik. Mikroplastik adalah jenis sampah plastik berukuran lebih kecil dari 5 mm, dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik primer adalah mikro partikel yang sengaja diproduksi untuk kebutuhan kosmetik atau serat pakaian sintetis, sedangkan mikroplastik sekunder

merupakan hasil fragmentasi atau perubahan menjadi ukuran lebih kecil secara fisik tetapi molekulnya sama berupa polimer (Ekosafitri et al., 2015). Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dwi Amanda (2023) mengatakan, jumlah sampel ikan di Indonesia yang mengandung mikroplastik 5 kali lebih banyak dibandingkan di Amerika. Keberadaan mikroplastik di dalam perut ikan dan sumber air tawar dapat menjadi jalan masuk ke tubuh manusia. Mikroplastik mengandung berbagai zat aditif yang berbahaya bagi Kesehatan. Potensi bahaya mikroplastik lainnya pada Kesehatan manusia adalah memicu pertumbuhan tumor, penghambat sistem imun, dan mengganggu sistem reproduksi.

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab mengelola sampah bersama-sama untuk dapat mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat (Kristiawan, 2023). Pada tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Bertepatan pada tanggal 21 Februari 2016 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberlakukan Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 yang berisi tentang kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah plastik, dikarenakan paling banyak digunakan oleh masyarakat. Kebijakan kantong plastik berbayar ini dianggap berguna untuk menekan laju dari timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi beban

pencemaran bagi lingkungan hidup. Sebanyak 17 daerah di Indonesia ikut dalam menerapkan kebijakan kantong berbayar, daerah tersebut adalah, Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makasar, Ambon dan Papua.

Evaluasi peraturan pengendalian penggunaan plastik telah diterapkan, misal Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin sendiri sejak 18 Maret 2016 telah memiliki Peraturan Walikota Banjarmasin No 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pelaksanaan Perwali tersebut telah berjalan secara efektif, meskipun masih terdapat kendala-kendala yang harus diperbaiki, seperti masyarakat yang masih keberatan untuk menggunakan kantong ramah lingkungan serta staf Badan Lingkungan Hidup yang masih sangat terbatas di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Vikalista, 2018). Selanjutnya Kota Bogor yang juga telah menerapkan Peraturan Walikota No 61 Tahun 2018 tentang Pelarangan Kantong Plastik. Koordinasi yang cukup baik dilakukan dalam lingkup internal pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor pun cukup baik dengan melibatkan para penggiat lingkungan serta pelajar untuk mensosialisasikan Peraturan Walikota ini. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti jumlah staf yang masih kurang serta terdapat masyarakat yang masih merasa keberatan terhadap penggunaan tas ramah lingkungan (Nurulhaq, Kismartini, Amirudin, 2020). Kemudian Kota Balikpapan yang juga telah menerapkan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang dalam pelaksanaannya sudah cukup baik dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan.

Namun, dalam hal pengawasan masih kurang maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran (Erwaningtyas, Irawan, Prakoso, 2020).

Sebagai Ibu Kota Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki timbulan sampah yang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Jawa Tengah. Berikut merupakan data timbulan sampag di Jawa Tengah pada tahun 2023 yang di dapatkan dari KLHK.

Tabel 1.3

Timbulan Sampah di Jawa Tengah 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah
Kab. Cilacap	172,771.48 ton
Kab. Purworejo	117,432.91 ton
Kab. Magelang	224,575.92 ton
Kab. Boyolali	107,941.52 ton
Kab. Sukoharjo	132601.14 ton
Kab. Grobogan	312,313.22 ton
Kab. Blora	141,433.02 ton
Kab. Jepara	149,214.49 ton
Kab. Pemalang	219,110.08 ton
Kota Magelang	29,400.33 ton
Kota Semarang	431,534.65 ton

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2023

Pada tabel diatas terdapat beberapa jumlah timbulan sampah beberapa daerah di Jawa Tengah, dilihat dari beberapa daerah yang ada, Kota Semarang memiliki timbulan sampah sebanyak 431,534.65 ton yang mana merupakan daerah dengan timbunan sampah tertinggi di Jawa Tengah.

Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, namun pada peraturan tersebut tidak termuat secara spesifik mengenai penanganan plastik. Kemudian Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Tujuan dari adanya Perwali tersebut yaitu :

- a. Mengendalikan terjadinya pencemaran dan/kerusakan lingkungan;
- b. Mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
- c. Menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dan
- f. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat bagi warga (Perwalkot Semarang No 27 Tahun 2019, pasal 2).

Pada Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa penghasil sampah yang dimaksud adalah pelaku usaha dan penyedia plastik seperti hotel, restoran, rumah makan, cafe, penjual makanan, dan toko modern. Pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa pelaku usaha atau penyedia plastic dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau *Styrofoam*. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan menyediakan kantong

alternatif ramah lingkungan atau produk pengganti pipet minuman plastik dan *Styrofoam* yang lebih ramah lingkungan (Kristiawan, 2023).

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, jenis sampah anorganik yang paling banyak adalah sampah plastik karena bahan ini massif digunakan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari oleh masyarakat.

Tabel 1.4
Jumlah Plastik di Kota Semarang

Tahun	Jumlah
2017	77.041,38 ton
2018	78.582,21 ton
2019	78.582,27 ton
2020	80.153,86 ton
2021	74.088,957 ton
2022	74.146,62 ton

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2023

Berdasarkan tabel, jumlah sampah plastik di Kota Semarang bersifat naik turun, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah sampah plastik menjadi bukti yang baik Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan dan penanganan sampah plastik (Kristiawan, 2023).

Tabel 1.5

Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Kota Semarang

Jenis Sampah	Jumlah Sampah (%)
Sisa Makanan	60.8 %
Kayu Ranting	-
Kertas-Karton	10.2 %
Plastik	17.2 %
Logam	1.2 %
Kain	4.9 %
Karet-Kulit	1 %
Kaca	1.8 %
Lainnya	2.9 %

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Dari data KLHK di tahun 2023, sampah plastik menduduki urutan ke-2 dengan jumlah timbunan terbanyak di Kota Semarang. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang jenis sampah anorganik yang mendominasi adalah sampah plastik mengingat bahan tersebut secara massif digunakan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari masyarakat Kota Semarang (Kristiawan, 2023).

Melalui Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, Walikota Semarang melimpahkan pelaksanaan tugas dan pengendalian kepada Dinas terkait. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam hal ini merupakan Lembaga atau instansi yang berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan plastik di Kota Semarang. Semenjak

diterbitkannya Peraturan Walikota No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik menjadi sebuah langkah awal dan komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk secara serius melakukan pengendalian penggunaan plastik demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat bagi Kota Semarang (Kristiawan, 2023).

Setelah adanya Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik menjadi pedoman atau acuan bagi pelaksana kebijakan untuk dapat melakukan serta menentukan langkah atau upaya dalam pengelolaan dan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang. Pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan penghasil sampah yang dimaksud adalah pelaku usaha dan/atau penyedia plastik, meliputi hotel, restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan, dan toko modern. Kemudian pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa para pelaku usaha yang dimaksud pada ayat 1, dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minuman plastik, atau *Styrofoam*. Sebagai gantinya, pelaku usaha dapat menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan, atau produk pengganti pipet minum plastik dan *Styrofoam* yang lebih ramah lingkungan. Namun setelah adanya Perwali tersebut, masih banyak pelaku usaha seperti rumah makan dan cafe yang tetap menggunakan plastik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

2. Apa faktor penghambat keberjalanan kebijakan pengendalian pengurangan plastik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019
2. Mengidentifikasi faktor penghambat kebijakan pengendalian pengurangan plastic

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana evaluasi program pengendalian pengurangan penggunaan sampah plastik di Kota Semarang dan memberikan informasi untuk perkembangan Ilmu Adminsitration Publik

2. Manfaat Praktis

- Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan, memperbaiki, dan menyempurnakan evaluasi pengendalian penggunaan plastik.
- Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk dapat mengembangkan serta menambah wawasan pengetahuan penulis dan pemahaman mengenai Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang.

- Masyarakat, dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan informasi mengenai evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik, diharapkan masyarakat akan lebih peduli dengan penggunaan sampah plastik dan juga ikut serta dalam pengendalian pengurangan plastik.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.6

Penelitian Terdahulu

NO	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup Kota Semarang/ Chanidia Ari Rahmayani, aminah/2021	Menganalisis efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang	Guna pengendalian laju pertumbuhan semakin banyaknya sampah plastik di Kota Semarang, maka dikeluarkanlah regulasi Peraturan Walikota Semarang mengenai Pengendalian plastik, dalam keberjalanannya regulasi tersebut telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku usaha toko modern dan swalayan, namun regulasi tersebut belum sepenuhnya dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan di Kota Semarang.
2.	Analisis implementasi pengelolaan dan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang/ Akyas Aryan Permana, Ahmad Taufiq, Puji Astute/2022	Mendeskripsikan serta menganalisis pengimplementasian pengelolaan dan pengendalian sampah plastik Kota Semarang	Implementasi dari Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan dalam keberjalanan peraturan walikota tersebut, pemerintah Kota Semarang tidak menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar.

			Sehingga produksi sampah di Kota Semarang pun tidak terkendali dan berkurang secara signifikan.
3.	Evaluasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin/Wulandari; Samputra/2022	Mengevaluasi kebijakan Walikota Banjarmasin No 18 Tahun 2016 dalam mengurangi sampah plastik demi Pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin	Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap 100 responden keluarga di Kelurahan Basirih untuk evaluasi terhadap kebijakan Walikota Banjarmasin No 18 Tahun 2016 dalam mengurangi sampah plastik. Hasil dari penelitian tersebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kelurahan Baisirih, kinerja kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu tidak baik atau tidak memuaskan.
4.	Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar/ Yohanes Kopong Blolo/2021	Mengidentifikasi keberjalanan dari kebijakan Pemerintah dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar	Berdasarkan penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar selaku implementor telah melakukan komunikasi dan sosialisasi kebijakan ini. Komunikasi antar pelaksana kebijakan ini sangat baik dan kelompok sasaran mendukung adanya kebijakan ini sehingga pelaksanaannya lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.
5.	Kajian lingkungan dalam kebijakan kantong plastik berbayar di Kota	Menganalisis implementasi kebijakan, perilaku konsumen dan faktor pendukung serta	Kebijakan dari kantong plastik berbayar telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, dengan segala

	Semarang/Muhammad Muslihun/2019	penghambat dalam kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan di Kota Semarang	upaya yang telah dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi timbunan sampah sesuai dengan kebijakan ini. Meskipun konsumen telah mengetahui serta mendukung kebijakan ini tetapi tidak banyak merubah perilaku konsumen, mereka masih terkesan acuh dalam menganggap sampah kantong plastik sebagai prioritas persampahan yang mendesak. Sehingga kebijakan ini masih kurang efektif dalam merubah perilaku konsumen.
6.	Pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap perilaku peduli lingkungan di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang/ Wulansari, Ainun; Thahjono, Heri; Sanjoto, Tjahturahono/2020	Mengidentifikasi kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, serta menganalisis pengaruh terhadap tingkat pendidikan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan	Penelitian tersebut dilakukan dengan metode analisis deskriptif serta pengumpulan kuisioner, didapatkan hasil bahwa perilaku peduli lingkungan masyarakat Desa Genting secara keseluruhan masuk dalam kriteria peduli. Kemudian, tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Genting memiliki pengaruh yang kuat pada penggunaan air, <i>energy</i> , serta pengelolaan sampah dalam pembentukan perilaku peduli lingkungan. Sehingga tingkat pendidikan tinggi dapat memberikan

			pengaruh yang kuat terhadap perilaku peduli lingkungan
7.	Analisis respon dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap penggunaan kantong belanja <i>Bio-Degrable</i> sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai/ Yerianida, Aulia Rizqi/2021	Mengidentifikasi bagaimana respon, perilaku, dan tingkat penggunaan kantong belanja sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai	Masyarakat hanya mengetahui namun belum memiliki pengalaman yang cukup terhadap penggunaan kantong <i>biodegradable</i> . Pemilik usaha memiliki perilaku pada tingkat kurang baik. Hal tersebut disebabkan adanya kendala dari aspek ekonomi ataupun individu.
8.	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan/Erwaningtyas, Irawan & Prakoso/2020	Mengidentifikasi keberjalanan dari Perwali Kota Balikpapan tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan	Implementasi Perwali No 8 Tahun 2018 tentang “Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan” telah berjalan dengan cukup baik dalam segi pembinaan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan sudah berjalan cukup baik. Namun, dalam hal pengawasan masih berjalan kurang maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kemudian, dalam hal pemberian sanksi administratif sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang ada.
9.	Efektivitas pengelolaan sampah Kota Semarang melalui program SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah)/ Apriliani, Dian; Maesaroh/2021	Mengkaji efektivitas persoalan aplikasi Silampah (Sistem Lapor Sampah) lebih lanjut lagi.	Masih kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan program Silampah (Sistem Lapor Sampah) mengakibatkan kurang maksimalnya

			kesadaran masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.
10	Monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang/ Afila, Riyana; Kismartini; Santoso, R. Slamet/2022	Mengidentifikasi efektivitas monitoring pada kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang dan juga mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya	Kegiatan monitoring yang dilakukan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum menjangkau seluruh sasaran kebijakan, terutama pelaku usaha yang bersifat baru cenderung belum menerapkan aturan tersebut
11	Plastic bag usage and the policies/ Li, yong; Wang, Bairong/2021	Penggunaan kantong plastik yang ekstensif telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan. Untuk menganalisis faktor penentu penggunaan kantong plastic lama dan kesediaan masyarakat untuk membayar kantong plastik	Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mendorong konsumen membawa kantong belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, seperti masyarakat yang membawa kantong belanja sendiri akan mendapatkan diskon atau subsidi.
12	Public participation and effectiveness of the no plastic bag day program in Malaysia/ Asmuni et al./2015	Mengidentifikasi efektivitas adanya program “No Plastic Bag Day”	Toko yang ada di Malayasia mengenakan biaya retribusi MYR 0.20 (USD 0.06) untuk kantong plastik baru dalam program No Plastic Day (NPD), hasil yang diperoleh 52,3% program ini sukses membuat konsumen menghindari pemakaian kantong plastik baru

13	Psychological interventional approach for reduce resource consumption : Reducing plastic bag usage at supermarkets/ Ohtomo, ohnuma/2014	Eksperimen terhadap perilaku pro-lingkungan dengan intervensi penggunaan kantong plastik di supermarket	Kondisi pertama toko akan memberikan plastik secara gratis dan kondisi kedua toko akan mengenakan biaya untuk kantong plastik. Dengan adanya intervensi, perilaku konsumen berubah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik
14	Consumer preference for attributes of single-use and multi-use plastic shopping bags in cape town/ Mugobo, victor virimai, ntuli Herbert/2022	Menganalisis preferensi konsumen terhadap atribut tas belanja dari sampel 250 konsumen yang ada di cape town	Kantong plastik sekali pakai meningkat menjadi tidak populer di seluruh dunia karena meningkatnya polusi plastik yang mengancam ekosistem darat dan laut. Situasi ini bahkan lebih buruk di negara-negara berkembang dan ekonomi dalam masa transisi seperti Afrika Selatan di mana konsumsi plastik didorong oleh kombinasi pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan rumah tangga yang dihasilkan dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan jam kerja yang lebih lama. Intervensi untuk mengurangi konsumsi plastik memerlukan informasi yang obyektif sehingga kebijakan yang kuat dapat dibuat agar sesuai dengan kondisi setempat.
15	Impact of single use polyethylene shopping bags on environmental	Menekankan bahaya kantong belanja polietilen sekali pakai	Harus ada kebijakan dan peraturan yang ketat untuk membatasi

	<p>pollution, a comprehensive review/ Hussain, Ayesha, Javed, Zafar/2020</p>	<p>di lingkungan dan tren yang muncul untuk mengatasi pengelolaan limbah plastik. Ini juga menawarkan bantuan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan mengatur pembuatan dan penggunaan kantong plastik.</p>	<p>penggunaan kantong plastik ke jumlah yang pasti. Perkemahan kesadaran harus direncanakan di setiap sudut metropolitan, terutama di zona kumuh untuk memperhatikan orang-orang dalam membatasi penggunaan kantong plastik dan hanya menggunakan kantong plastik biodegradable. Mikroba maksimum yang dapat menguraikan plastik harus disaring untuk membedakan mekanisme degradasi yang tepat.</p>
--	--	--	--

Beberapa penelitian yang membahas terkait regulasi kebijakan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani dan Aminah (2021) dengan judul “Efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang” dan penelitian yang dilakukan oleh Permana; Taufiq dan Astute (2022) dengan judul “Analisis implementasi pengelolaan dan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang” yang mana kedua penelitian tersebut sama sama memiliki lokus di Kota Semarang, dan berpatokan dengan kebijakan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019.

Kemudian penelitian yang membahas terkait evaluasi kebijakan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Samputra (2022) dengan judul “Evaluasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin” yang membahas terkait keberjalanan kebijakan Walikota Banjarmasin No 18 Tahun 2016 dalam mengurangi sampah plastik demi Pembangunan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

Adapun penelitian yang membahas terkait implementasi kebijakan yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Blolo (2021) dengan judul “Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar” dan penelitian yang dilakukan oleh Erwaningtyas & Prakoso (2020) dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan”. Memiliki pembahasan yang sama yaitu implementasi terkait kebijakan pengurangan penggunaan sampah plastik. Namun, memiliki lokus yang berbeda yang mana pada Blolo berada di Denpasar dan penelitian yang dilakukan oleh Erwaningtyas & Prakoso berada di Kota Balikpapan.

Penelitian yang membahas terkait respon dari masyarakat yang dilakukan oleh Wulansari; Thahjono; Sanjoto (2020) dengan judul “Pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap perilaku peduli lingkungan di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yerianida; Rizqi (2021) dengan judul

“Analisis respon dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap penggunaan kantong belanja sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai” dan penelitian yang dilakukan oleh Muslihun (2019) dengan judul “Kajian lingkungan dalam kebijakam kantong plastik berbayar di Kota Semarang, kemudian penelitian oleh Ohtomo, Ohtuma (2014) yaitu Psychological interventional approach for reduce resource consumption : Reducing plastic bag usage at supermarkets, selanjutnya penelitian oleh Mugobo, Victor Virimai, Ntuli Herbert (2022) tentang Consumer preference for attributes of single-use and multi-use plastic shopping bags in cape town Kelima penelitian ini membahas mengenai respon dari masyarakat terkait Upaya pengendalian sampah plastik dalam rangka peduli lingkungan dan juga membahas tentang respon masyarakat dengan adanya kebijakan pengurangan penggunaan plastik dan beralih menggunakan kantong belanja.

Kemudian penelitian yang membahas terkait monitoring kebijakan penelitian yang dilakukan oleh Afila; Kismartini; Santoso (2022) dengan judul “Monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang” dan penelitian yang dilakukan oleh Apriliani; Maesaroh (2021) dengan judul “efektivitas pengelolaan sampah Kota Semarang melalui program SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) yang mana dari kedua penelitian tersebut memiliki lokus yang sama yaitu Kota Semarang.

Penelitian yang membahas mengenai Efektivitas, yaitu penelitian oleh Asmuni (2015) dengan judul Public Participation and Effectiveness of the no plastic bag day program in Malaysia, yang membahas mengenai adanya program “No Plastic Bag Day” . dan yang terakhir penelitian yang membahas mengenai bahaya plastic, yaitu penelitian oleh Li, yong; Wang, Bairong (2021) dengan judul Plastic bag usage and the policies dan penelitian yang dilakukan oleh Hussain, Ayesha, Javed, Zafar (2020) dengan judul Impact of single use polyethylene shopping bags on environmental pollution, a comprehensive review.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, pada penelitian ini membahas mengenai Perwali No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, pada penelitian ini melihat mengenai bagaimana keberjalanan Kebijakan Perwali sejak Perwali dikeluarkan.

1.5.2 Administrasi Publik

Terdapat beberapa definisi Administrasi Publik yang beragam seiring dengan perkembangannya. Setiap definisi menekankan aspek yang berbeda. Secara umum, administrasi publik diartikan sebagai kerja sama kompleks antara praktik dan teori, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat (Pasolong, 2011). Menurut Syafie (2006), administrasi publik juga diartikan sebagai keseluruhan proses implementasi atau penegakan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif, baik oleh organisasi maupun individu. Dia juga menyatakan bahwa tujuan administrasi adalah untuk mendorong kemajuan organisasi, melibatkan departemen pemerintahan, termasuk eksekutif, legislative, dan yudikatif, yang memiliki peran sentral dalam pembuatan kebijakan publik serta memberikan layanan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok.

Menurut Pasolong (2011), administrasi publik merupakan organisasi yang mengelola sumber daya manusia dan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Dengan demikian, administrasi publik dapat dijelaskan sebagai pengorganisasian sebuah kelompok atau lembaga dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah publik secara efektif dan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Pengetahuan dan teori merupakan produk dari pemikiran manusia. Oleh karena itu, hal yang wajar apabila suatu teori mengalami evolusi atau peningkatan. Seperti ilmu pengetahuan yang berkembang seiring dengan kebutuhan pada masanya, bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ada pada era tersebut. Perkembangan atau perubahan dalam sebuah teori sering kali terjadi karena teori yang sudah ada dianggap tidak lagi relevan atau tidak mampu mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat pada suatu periode waktu tertentu. Perubahan ini dikenal sebagai pergeseran paradigma.

Paradigma dapat dianggap sebagai pandangan umum, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau pendekatan ilmiah yang digunakan oleh masyarakat pada periode waktu tertentu (Thomas Kuhn). Menurut Robert T. Golembieswski, paradigma juga merupakan standar dalam suatu bidang ilmu yang dilihat dari sudut fokus dan wilayahnya.

Administrasi publik adalah bidang ilmu yang terus berubah dan berkembang seiring waktu, mengikuti perubahan dan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul mencerminkan sudut pandang para ahli mengenai peran dan tantangan administrasi publik dalam mengatasi masalah yang timbul. Meskipun terdapat perdebatan dalam setiap paradigma, secara umum para ahli mengidentifikasi lima perkembangan paradigma administrasi publik.

Paradigma 1 Dikotomi Politik dan Administrasi

Dikenal dengan sebutan paradigma Politik dan Administrasi yang dikotomi, tokoh-tokoh terkemuka di dalamnya adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow (1900) menyatakan bahwa politik seharusnya berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi fokus pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi juga terlihat dalam struktur pemerintahan Indonesia, di mana badan legislative bertanggung jawab

atas pembuatan undang-undang dan mewakili ekspresi kehendak rakyat, sementara badan eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang dan badan yudikatif membantu badan legislative dalam menetapkan tujuan dan merumuskan kebijakan.

Implikasi dari paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dianggap netral secara nilai-nilai, dan harus ditunjukkan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dalam birokrasi pemerintahan. Namun, paradigma ini hanya menekankan pada aspek lokus, yaitu birokrasi pemerintahan, tanpa memberikan penjelasan rinci tentang fokus atau metode yang harus dikembangkan dalam administrasi.

Paradigma 2 Prinsip-Prinsip Administrasi

Tokoh-tokoh dalam paradigma ini, seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick, sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka mengenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus utama administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan melalui konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*), yang menurut mereka memiliki karakteristik universal. Meskipun demikian, lokus dari administrasi publik tidak pernah dijelaskan secara eksplisit oleh mereka, karena mereka meyakini bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan di berbagai tempat, termasuk dalam organisasi pemerintah.

Paradigma 3 Administrasi Sebagai Ilmu Politik

Herbert Simon mengkritik inkonsistensi prinsip-prinsip administrasi, menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku secara universal. Baginya, administrasi negara tidaklah bebas nilai atau bisa diterapkan dimana saja, melainkan selalu terpengaruh oleh nilai-nilai tertentu. Pendapat ini diperkuat oleh John Gaus, yang menyatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga merupakan teori politik. Hal ini menghasilkan paradigma baru yang memandang administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik, dengan lokusnya

pada birokrasi pemerintahan. Fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik dinilai memiliki banyak kelemahan. Akibatnya, pada masa ini, administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap sebagai disiplin yang sangat dominan dalam bidang administrasi.

Paradigma 4 Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi

Ilmu administrasi negara sedang mencari landasan baru yang ditemukan dalam ilmu administrasi. Ilmu administrasi adalah disiplin yang menggabungkan studi organisasi dan teori manajemen. Teori organisasi menggunakan kontribusi dari ilmu jiwa sosial, administrasi bisnis, administrasi publik, dan sosiologi untuk memahami perilaku organisasi, sementara teori manajemen mengandalkan kontribusi dari ilmu statistik, computer, analisis sistem, dan ekonomi untuk memahami perilaku organisasi. Prinsip-prinsip ilmu administrasi negara juga tidak terlepas dari kontribusi disiplin-disiplin tersebut. Prinsip-prinsip administrasi negara dianggap berlaku secara universal, yang menghasilkan keinginan untuk memisahkan mereka dari prinsip-prinsip administrasi lainnya. Fokus dari ilmu administrasi negara adalah organisasi publik.

Paradigma 5 Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Dalam paradigma kelima ini, perhatian administrasi publik terpusat pada teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. menurut Keban (2014), fokus administrasi publik adalah pada masalah dan kepentingan publik.

Paradigma 6 *Governance*

Paradigma ini adalah yang terkini, menurut Nugroho (2017), yaitu paradigma *governance*. Didalam paradigma ini, pemerintah berperan sebagai mitra atau jaringan, dimana organisasi berupaya memberikan manfaat publik atau kesejahteraan kepada masyarakatnya dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Selain itu, terdapat upaya untuk mencapai efisiensi yang

lebih tinggi dan stabilitas organisasi, serta mengurangi tumpang tindih program-program. Paradigma governance berusaha untuk mengatur ulang peran sektor publik melalui partisipasi masyarakat dan Kerjasama.

Ditinjau dari enam paradigma yang telah disebutkan, penelitian ini termasuk dalam paradigma kelima, yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. karena dalam paradigmanya, perhatian terfokus pada kebijakan publik untuk menangani masalah-masalah dan memprioritaskan kepentingan publik.

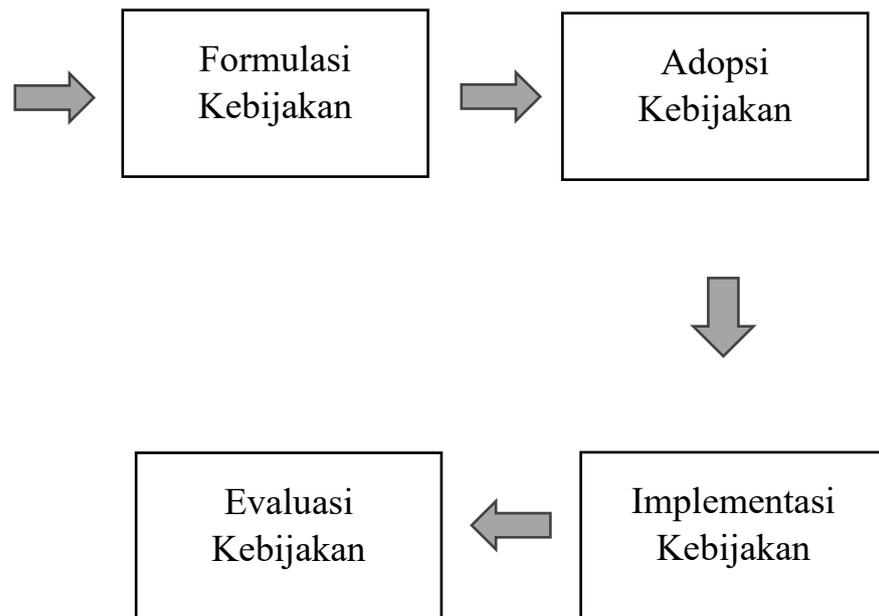
1.5.4 Kebijakan Publik

Menurut lembaga administrasi negara pada tahun 1996, kebijakan diartikan sebagai peraturan-peraturan yang harus menjadi Pedoman atau acuan bagi semua usaha dan kegiatan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan tercapainya kelancaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Tangkilisan (2003), kebijakan publik merupakan penggunaan yang strategis dari sumber daya yang tersedia untuk mengatasi permasalahan yang bersifat publik atau yang dihadapi oleh pemerintah.

Adapun tahapan kebijakan publik menurut William Dunn (2003) :

Penyusunan Kebijakan



A. Penyusunan Kebijakan

Sebelumnya, permasalahan-permasalahan yang ada dipilih secara selektif untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, sehingga beberapa permasalahan akan ditetapkan sebagai prioritas oleh para pembuat kebijakan

B. Formulasi Kebijakan

Permasalahan yang dimasukkan kedalam agenda kebijakan kemudian diselidiki oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut dijelaskan secara rinci untuk mencari solusi terbaik. Solusi-solusi tersebut didasarkan pada berbagai alternatif kebijakan.

C. Adopsi Kebijakan

Dari beberapa opsi kebijakan yang diajukan oleh para pembuat kebijakan, hanya satu opsi kebijakan yang akan diterima dan diadopsi.

D. Implementasi Kebijakan

Merupakan tindakan yang berkelanjutan setelah proses pembuatan kebijakan dan merupakan implementasi dari keputusan kebijakan

E. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

Dari tahapan kebijakan tersebut, penulis menggunakan tahapan evaluasi kebijakan sesuai dengan fokus yang telah ditentukan sebelumnya.

1.5.5 Evaluasi Kebijakan

Menurut Mohi dan Akbar (2018) evaluasi merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk merencanakan, memantau, dan meningkatkan kinerja pemerintah serta hasil-hasilnya. Hal ini bertujuan agar pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka dimasa depan dan menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Menurut Nugroho (2014), tujuan utama dari evaluasi adalah untuk memahami pencapaian dan harapan dari kebijakan, bukan untuk menyalahkan. Evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengamati dampak dari program atau pembuatan kebijakan.

Menurut Hattry (1976) kegiatan evaluasi kebijakan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan fokus dari evaluasi yang dilakukan
2. Memutuskan data apa yang akan dihasilkan
3. Menetapkan perubahan-perubahan yang akan diukur
4. Menggunakan multi metode dalam melakukan pengukuran
5. Mendesain evaluasi sehingga dapat merespon berbagai modifikasi program
6. Mendesain evaluasi

Menurut Bridman & Davis (2000) pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator, yaitu :

- a. Indikator input termasuk sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur pendukung

- b. Indikator proses mencakup bentuk pelayanan kepada masyarakat serta efektifitas dan efisiensi dari metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut
- c. Indikator output termasuk tujuan dari kebijakan dan kesesuaian antara tujuan tersebut dengan hasil dari kebijakan publik
- d. Indikator outcomes mencakup dampak yang diterima oleh pihak yang terkena kebijakan baik bersifat positif ataupun negatif

Sementara itu Dunn (2003:608) mengatakan evaluasi kebijakan adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang mengandung kriteria sebagai berikut :

1. Efektivitas mencakup pencapaian tujuan secara tepat sesuai dengan sasaran yang diinginkan dan kesesuaian kebijakan dengan tujuan dan perannya. Efektivitas juga terkait dengan hasil yang tercapai, menilai apakah hasil yang diharapkan telah terwujud karena adanya implementasi kebijakan.
2. Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi juga terkait dengan jumlah upaya yang diperlukan untuk mencapai Tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan merujuk pada kesesuaian antara kebijakan, program, dan regulasi yang ditetapkan dengan Kerjasama organisasi dalam mencapai tujuan. Kecukupan juga mengindikasikan seberapa efektif kebijakan dalam menangani masalah yang dihadapi.
4. Perataan adalah upaya untuk menyeimbangkan pencapaian hasil kebijakan diseluruh organisasi dan lingkungan, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing. Ini melibatkan analisis untuk memastikan bahwa manfaat dari kebijakan telah didistribusikan secara merata kepada berbagai kelompok masyarakat.
5. Responsivitas mencakup kemampuan birokrasi untuk memahami dan merespon kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan program-program sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi mereka. Responsivitas, juga terkait dengan Tingkat kepuasan masyarakat, terutama kelompok sasaran, terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

6. Ketetapan merujuk pada kepastian dalam pelaksanaan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ketetapan juga berhubungan dengan pertanyaan apakah tujuan kebijakan atau program tersebut sesuai untuk suatu masyarakat.

1.5.6 Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Merilee S. Grindle (dalam Akib dan Tarigan, 2008) implementasi merupakan proses yang dapat diteliti dalam Tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan berfungsi sebagai jembatan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai oleh pemerintah. Grindle (1980:7) juga menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan dapat dinilai dari kemampuan dalam melaksanakan program. Hal tersebut dapat diukur dari hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan juga dapat diamati melalui dua aspek, yaitu :

- A. Berdasarkan proses, yaitu dengan menilai pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan
- B. Memeriksa apakah tujuan kebijakan telah tercapai melalui dua faktor yang dapat diamati, yaitu :
 - Penerimaan dari kelompok sasaran dan Tingkat perubahan yang terjadi
 - Dampak yang terjadi pada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok

Grindle (1980) juga menyatakan bahwa Tingkat kelayakan implementasi suatu kebijakan dapat diamati melalui konteks dan isi kebijakan, diantaranya :

1. Isi Kebijakan (Content of policy)
 - Tipe Manfaat

Isi kebijakan menjelaskan bahwa suatu kebijakan dapat terdiri dari berbagai jenis manfaat yang memberikan dampak positif dari pelaksanaannya.

- Derajat perubahan yang diinginkan

Tingkat perubahan yang diinginkan berkaitan dengan seberapa besar pencapaian dari transisi yang dilakukan dengan skala implementasi kebijakan yang jelas

- Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Pelaksana kebijakan melibatkan berbagai kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaannya

- Sumber daya yang dilibatkan

Dukungan dari sumber daya yang digunakan dalam penerapan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut

- Pelaksanaan program

Adanya dukungan dari pelaksana kebijakan yang kompeten dibidangnya

- Letak pengambilan Keputusan

Pemaparan mengenai lokasi dimana Keputusan kebijakan dibuat

2. Lingkungan Implementasi (Context of implementation)

- Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap mengacu pada sejauh mana para pelaksana kebijakan mematuhi, merespon, dan memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang diberlakukan

- Karakteristik lembaga dan pengusaha

Karakteristik dari lembaga atau penguasa menggambarkan karakter dan sifat mereka yang pada akhirnya memengaruhi pelaksanaan kebijakan

- Kekuasaan, kepentingan, serta strategi aktor yang terlibat

Analisis kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat membantu dalam memahami bagaimana mereka menggunakan kekuasaan, otoritas, strategi, dan kepentingan mereka untuk mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

1.5.7 Sampah

1.5.7.1 Pengertian Sampah

Masalah lingkungan saat ini terjadi diberbagai tempat, terutama terkait dengan pencemaran, baik itu pencemaran tanah, air, udara, maupun suara. Pencemaran ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalnya, pencemaran tanah disebabkan oleh akumulasi sampah di tempat pembuangan sampah. Jika tidak segera ditangani dengan baik, hal ini dapat menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat. Sampah, yang merupakan limbah padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak lagi berguna, harus dikelola dengan baik untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan dan untuk melindungi investasi Pembangunan (SK SNI, 1990).

Menurut World Health Organization (WHO), sampah merujuk kepada benda-benda yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau barang yang dibuang yang berasal dari aktivitas manusia dan tidak terjadi secara alami. Sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang “Pengelolaan Sampah”, sampah diartikan sebagai hasil sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, baik organik maupun anorganik, yang cenderung terurai dan dianggap tidak lagi bermanfaat, kemudian dibuang ke lingkungan. Karden Eddy Sontang Manik (2003) menjelaskan sampah sebagai benda yang tidak digunakan atau tidak diinginkan dan harus dibuang yang dihasilkan dari aktivitas manusia.

1.5.7.2 Jenis-Jenis Sampah

Sampah terbagi menjadi beberapa jenis (Nugroho, 2013) yaitu :

- a. Berdasarkan sifatnya
 - Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah-sampah ini dapat diolah lebih lanjut seperti dijadikan kompos.
 - Sampah anorganik, adalah sampah yang tidak dapat terurai dengan sendirinya, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastic mainan, botol dan juga gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah organik dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku bila dijual untuk dijadikan produk lain.
- b. Berdasarkan bentuknya
 - Sampah padat, seperti sampah dapur, sampah kebun, plastik, gelas, dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan nonorganik
 - Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan Kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

Menurut Notoatmodjo (2011), sampah dibagi menjadi berbagai jenis yaitu :

- a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya
 - Sampah anorganik, sampah yang tidak mengalami proses pembusukan tetapi dapat mengalami proses perkaratan seperti botol plastik, notol kaca, keramik, kaleng.
 - Sampah organik, sampah yang mengalami pembusukan misalnya daun kering, kulit buah, buah-buahan busuk, kertas bekas.
- b. Berdasarkan dapat dan tidak dapat dibakar

- Sampah yang mudah dibakar seperti kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas dan sebagainya.
 - Sampah yang tidak dapat dibakar seperti kaleng-kaleng bekas, besi/logam, pecahan gelas/kaca dan sebagainya.
- c. Berdasarkan karakteristik sampah
- *Garbage*, sampah yang dihasilkan dari pengolahan dan pembuatan makanan yang digunakan oleh manusia yang biasanya berasal dari rumah tangga maupun tempat umum.
 - *Rubbish*, sampah yang bentuknya tidak mudah terbakar oleh api yang biasanya berasal dari perkantoran.
 - *Ashes* (abu), yaitu sampah yang dihasilkan dari sisa pembakaran.
 - Sampah jalanan (*street sweeping*), yaitu sampah yang dihasilkan dari masyarakat ataupun kegiatan yang ada di jalan yang berjenis sampah campuran.
 - Sampah industri, yaitu sampah yang dihasilkan dari sisa aktivitas pabrik industri.
 - Bangkai binatang (*dead animal*), yaitu sisa bagian tubuh hewan yang membusuk akibat proses alam.
 - Bangkai kendaraan, yaitu sampah yang dihasilkan dari kendaraan yang tidak lagi digunakan oleh manusia.
 - Sampah pembangunan, yaitu sampah yang dihasilkan dari proses kegiatan Pembangunan atau material sisa bahan bangunan yang digunakan manusia.

Menurut Sejati (2009) jenis sampah dibedakan menjadi tiga golongan yaitu

- Sampah organik atau basah, merupakan sampah yang dihasilkan dari manusia, hewan dan tumbuhan yang dapat mengalami proses pembusukan.
- Sampah anorganik atau kering, sampah kering merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia secara alami terdegradasi atau hasil dari pembuatan manusia.

- Sampah berbahaya, sampah yang dihasilkan dari barang-barang berbahaya yang mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan kerusakan jika digunakan lagi dan perlu penanganan lebih lanjut.

Dari beberapa pendapat tentang jenis-jenis sampah, maka dapat disimpulkan bahwa sampah memiliki beberapa jenis seperti :

- Sampah organik, sampah yang dapat membusuk, sampah organik terdiri dari bahan basah yang tidak tahan lama dan cepat membusuk. Sampah organik berasal dari makanan, daun kering, sayuran, kotoran hewan.
- Sampah anorganik, jenis sampah yang tidak dapat membusuk. Misalnya, botol kaca, plastik, besi berkarat.
- Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sampah yang mengandung zat beracun, seperti, cairan pembersih, pengharum ruangan, pembersih lantai.

1.5.7.3 Dampak Sampah

Sampah juga berdampak terhadap lingkungan, baik ekosistem perairan maupun ekosistem darat. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Tanjab Barat (2017) mengatakan ada beberapa dampak dari sampah, yaitu :

1. Sampah terhadap ekosistem perairan

Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah nonorganik. Pada sampah organik dapat menjadi makanan untuk ikan dan makhluk hidup lainnya, tetapi sampah juga dapat mengurangi kadar oksigen dalam lingkungan perairan. Sedangkan untuk sampah anorganik dapat mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam lingkungan perairan. Akibatnya, proses esensial dalam ekosistem seperti fotosintesis menjadi terganggu.

2. Dampak sampah terhadap ekosistem daratan

Sampah yang dibuang ke dalam ekosistem darat dapat mengundang organisme tertentu untuk datang dan berkembangbiak. Organisma yang biasanya memanfaatkan sampah tersebut seperti tikus, lalat, kecoa dan lain-lain.

3. Dampak sampah terhadap Kesehatan

Sampah yang menumpuk akan menarik organisme seperti lalat, tikus, kecoa, anjing yang dapat menjangkitkan penyakit, potensi bahaya Kesehatan yang ditimbulkan seperti :

- 1) Penyakit diare, kolera, tifus dan demam berdarah yang menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat dapat bercampur dengan air minum.
- 2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit)
- 3) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Seperti penyakit dari cacing pita. Yang mana cacing pita masuk dari pencernaan Binatang ternak yang makanannya berupa sisa makanan/sampah
- 4) Sampah beracun

1.5.8 Sampah Plastik

Adenkule (2014) menyatakan bahwa sebagian besar limbah padat perkotaan terdiri dari berbagai jenis seperti zat organik, plastic, kaca, logam, tekstil, dan bahan karet. Namun, komposisi dan jumlah limbah tersebut berbeda-beda antara wilayah dan negara. Setiap tahun, sampah plastic merupakan salah satu jenis limbah anorganik yang dihasilkan oleh seluruh dunia. Seperti yang telah diketahui, sampah plastik sulit terurai dalam tanah dan memerlukan waktu bertahun-tahun, menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Secara umum, komposisi sampah plastik ini terdiri dari 46% *polyethylene (HDPE dan LDPE)*, 16% *polypropylene (PP)*, 16% *polystyrene (PS)*, 7% *polyvinyl chloride (PVC)*, 5 % *polyethylene terephthalate (PET)*, 5% *polimer-polimer lainnya (vasile, 2002)*

Manajemen pengelolaan sampah plastik, mulai dari tingkat rumah tangga hingga skala kota yang dikelola oleh pemerintah setempat, sangat penting. Untuk mempermudah pengelolaan sampah plastik ditingkat rumah tangga, diperlukan pemahaman tentang jenis-jenis plastik, bahan-bahannya, dan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga dapat dikembangkan manajemen pengelolaan yang efektif. Membuang sampah plastic ke tempat pembuangan akhir (TPA) tidaklah menjadi solusi yang bijak. Meskipun demikian, peran pemulung dalam mengurangi akumulasi sampah plastik layak dihargai, meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan jumlah sampah plastik yang ada.

Material plastik, yang mulai dikembangkan secara luas dan digunakan pada abad ke-20, telah mengalami pertumbuhan penggunaan yang signifikan. Pada tahun 1930-an, penggunaannya hanya mencapai beberapa ratus ton, tetapi meningkat pesat menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an, dan mencapai 220 juta per tahun pada tahun 2005. Plastik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu thermoplastic dan thermosetting. Thermoplastic adalah jenis plastik yang dapat meleleh saat dipanaskan pada suhu tertentu dan dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk. Sementara itu, thermosetting adalah jenis plastik yang setelah dipadatkan, tidak dapat meleleh Kembali meskipun dipanaskan (Surono, 2013).

Sampah plastik merujuk pada bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak digunakan dalam produksi atau penggunaan barang, biasanya karena cacat selama proses manufaktur, kelebihan bahan, atau limbah. Ini merupakan barang yang tidak berguna lagi bagi pemiliknya atau pengguna awalnya (Tanjung).

1.5.8.1 Dampak Sampah Plastik

Sampah plastik merupakan ancaman serius bagi lingkungan karena jumlahnya yang terus meningkat. Kantong plastik, sebagai salah satu jenis sampah plastik, sulit terurai oleh proses alam dan menjadi salah satu sumber pencemar.

Menurut Ditjen PPKL-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah plastik memiliki beberapa dampak yang signifikan. Jika dibakar secara terbuka, sampah plastik dapat menyebabkan polusi udara yang berpotensi menimbulkan penyakit serius seperti kanker dan gangguan kulit. Selain itu, sampah plastik juga dapat mencemari berbagai saluran air irigasi, Sungai, danau, Pantai, dan tanah. Bukti menunjukkan bahwa sampah plastik dapat menyumbat saluran air atau Sungai, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan banjir.

1.5.8.2 Pengelolaan Sampah Plastik

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah plastik yaitu dengan cara 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) (Purwaningrum, 2016) :

1. *Reuse*, menggunakan kembali barang-barang yang terbuat dari plastik
2. *Reduce*, mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang dari plastik, terutama untuk barang-barang sekali pakai
3. *Recycle*, mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastic

1.6 Kerangka Pikir

Penggunaan plastik yang berlebihan berujung pada kerusakan lingkungan dan mempengaruhi Kesehatan. Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian penggunaan plastik sebagai upaya dari pengurangan plastik di Kota Semarang

Permasalahan

1. Bagaimana pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik
2. Apa faktor penghambat keberjalanan kebijakan pengendalian pengurangan

Tujuan

1. Mengevaluasi pengendalian Penggunaan plastik di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik
2. Mengidentifikasi faktor penghambat kebijakan pengendalian pengurangan plastik

Pengukuran evaluasi kebijakan

(Dunn, 2003)

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Perataan
4. Responsivitas
5. Kecukupan
6. Ketetapan

Kesimpulan
Rekomendasi

1.7 Operasionalisasi Konsep

Priadi (2018) mengutip Sugiyono, menyatakan bahwa definisi operasional adalah penentuan sifat yang akan diteliti sehingga dapat diukur oleh peneliti. Sedangkan menurut Nani (dalam Priadi, 2018) operasional adalah penjabaran mengenai cakupan dan karakteristik dari konsep yang menjadi inti pembahasan dan penelitian ilmiah. Dengan demikian, operasionalisasi konsep merupakan cara untuk menyusun konsep penelitian dalam bentuk yang lebih konkret, sering kali disajikan dalam tabel agar mudah dipahami dan diukur. Operasionalisasi konsep yang digunakan yaitu :

a. **Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi merupakan metode untuk mengevaluai kinerja suatu kebijakan atau program untuk menentukan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi kebijakan dilakukan saat kebijakan tersebut sedang diterapkan. Dalam konteks ini, evaluasi dilakukan terhadap kebijakan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang masih berlaku saat ini. Teori yang digunakan dalam evaluasi ini adalah teori Dunn (2003), yang mencakup empat kriteria : Efektivitas, Efisiensi, Perataan, Responsivitas.

b. **Mengidentifikasi faktor penghambat kebijakan pengendalian penggunaan plastik dengan identifikasi melalui indikator keberhasilan implementasi menurut Dunn (2003)**

Tabel 1.7

Operasionalisasi Konsep

Fokus Penelitian	Fenomena	Indikasi Penelitian
Mengidentifikasi dan mengevaluasi pengendalian sampah plastik di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019	Efektivitas	Tercapainya tujuan kebijakan serta strategi pelaksanaan kebijakan
	Efisiensi	Waktu serta biaya dalam mencapai tujuan kebijakan
	Perataan	Luasnya jangkauan kebijakan
	Responsivitas	Respon masyarakat terhadap kebijakan
Faktor penghambat kebijakan pengendalian penggunaan plastik	Kecukupan	Sumber daya yang dilibatkan serta pelaksanaan program
	Ketetapan	Strategi aktor yang terlibat serta kepatuhan dan daya tanggap untuk mencapai tujuan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh subjek penelitian (Lexy J. Moleong, 2007).

Metode kualitatif dipilih karena untuk memahami fenomena yang mendalam mengenai evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang

1.8.2 Situs Penelitian

Fokus penelitian ini adalah evaluasi pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang. Sehingga lokus penelitian dilakukan di Kota Semarang khususnya pelaku usaha rumah makan dan cafe di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang dipilih karena merupakan salah satu kota yang telah memiliki kebijakan tentang pengendalian penggunaan plastik, selain itu Kota Semarang merupakan kota yang memiliki jumlah sampah terbanyak di Jawa Tengah.

Kecamatan Tembalang dipilih menjadi lokus penelitian karena merupakan Kecamatan dengan penduduk terbanyak kedua, dan terbanyak pertama jumlah UMKM.

1.8.3 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2011) subjek penelitian merupakan batas atau garis yang digunakan peneliti dalam menentukan benda atau orang sebagai titik lekatnya variabel penelitian. Subjek penelitian berkaitan dengan informan yang memberikan informasi berguna dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Penulis menggunakan *purposive sampling* sebagai pengambilan sampel. Model *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel probabilitas yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu yang telah dilakukan sebelumnya (Sugiyono, 2019). Teknik *purposive sampling* dipilih untuk mendapatkan informasi yang rinci dari subjek penelitian agar relevan dengan topik yang dipilih. Informan yang dipilih oleh penulis yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Pelaku Usaha (rumah makan dan cafe) dan masyarakat/pengunjung.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dipilih menjadi informan karena mereka yang menjadi pelaksana kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang. Informan lainnya yaitu pelaku usaha dan masyarakat dipilih karena merupakan sasaran dari kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang.

1.8.4 Sumber Data

Ketika melakukan penelitian, kita memerlukan data sesuai topik untuk dianalisis. Data tersebut diperoleh dengan proses pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri merupakan tahapan riset ketika peneliti menerapkan Teknik-teknik ilmiah untuk memperoleh data sistematis demi keperluan analisis.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi dasar atau inti yang menjadi dasar penelitian. Jenis data ini diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, survey, eksperimen, dan metode lainnya. Data primer memiliki tingkat spesifitas yang tinggi karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan secara sengaja oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan data peneliti. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, situs web, atau dokumen pemerintah.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi secara langsung (Yusuf, 2014). Wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan responden/narasumber. Wawancara biasanya dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatif yang orientik.

Tujuan dari wawancara yaitu untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Teknik pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara sistemais atau tidak sistematis. Sistematis adalah wawancara dilakukan terlebih dahulu kemudian peneliti menyusun instrument pedoman wawancara. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi yaitu suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Tujuan dari observasi yaitu melahirkan teori dan hipotesis (pada penelitian kualitatif), atau menguji teori hipotesis (pada penelitian kuantitatif). Fungsi observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dipakai guna mendapatkan data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berwujud laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015,329).

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah suatu tahap mengorganisir data sesuai dengan pola, kategori, dan unit-unit deskriptif tertentu. Sedangkan, interpretasi adalah proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada (Barnsley & Ellis, 1992). Terdapat tiga tahapan analisis data berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, sebagai proses menyederhanakan data mentah/kasar yang didapat dari catatan-catatan hasil pengumpulan data di lapangan.
2. Penyajian data, data yang telah dikumpulkan dari lapangan, disajikan secara tertulis berdasarkan kondisi actual yang berkaitan.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif.

Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan para informan, observasi pada lokus yang telah ditentukan, dan pengkajian dokumen-dokumen yang relevan dengan fenomena penelitian (jurnal penelitian terdahulu, dokumen resmi dari *website* instansi pemerintahan). Data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada didalam kerangka teori penelitian sehingga didapatkan hasil dan pembahasan terkait permasalahan yang diteliti, kemudian dapat ditarik kesimpulan.

1.8.7 Kualitas Data

Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai data yang diperoleh dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2015:83). Terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Menguji kreadibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Menguji kreadibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan Teknik yang berbeda. misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara

3. Triangulasi waktu

Waktu dapat mempengaruhi kreadibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan Teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Sehingga suatu data harus dilakukan pengecekan

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

Dalam penulisan ini menggunakan Triangulasi sumber dengan melakukan wawancara pada beberapa narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya.